

## PERUBAHAN STRATEGI KEAMANAN AMERIKA SERIKAT DI ASIA-PASIFIK DAN RESPONS INDONESIA

### STRATEGIC CHANGES OF US SECURITY POLICY IN PACIFIC ASIA AND INDONESIA'S RESPONSE

Poltak Partogi Nainggolan\*

Naskah diterima 9 Desember 2013, disetujui 23 Desember 2013

#### abstract

*Since the end of 2011, US changing policy on Asia-Pacific can be more obviously seen. President Obama, for example, has stated that US will permanently exist in the region after for long-time focused its policy on Middle East and Europe. This article is part of research report on the changing paradigm of US security policy in the Asia-Pacific region. The article is developed from a descriptive analytical research which applies a qualitative method. Data gathering is conducted by combining library studies and an open in-depth interview. Findings reveal the relevance between US national interest and its strategic pivot in the Asia-Pacific region, and the Indonesian military response to it.*

**Keywords:** *US, Indonesia, PRC, security policy, security paradigm, strategic interest, strategy pivot, Asia-Pacific*

#### abstrak

Sejak akhir 2011, perubahan kebijakan Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia Pasifik tampak semakin jelas. Presiden Obama telah menyatakan secara tegas kehadiran kembali AS di kawasan ini setelah selama ini lebih menitikberatkan kebijakannya di Timur-Tengah dan Eropa. Tulisan ini bagian dari hasil penelitian tahun 2012 mengenai perubahan orientasi kebijakan keamanan AS di kawasan. Penelitian bersifat deskriptis-analitis, dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Temuan penelitian memperlihatkan kaitan kepentingan nasional AS dan perubahan strategi keamanannya di Asia Pasifik, serta respons militer Indonesia terhadap perubahan tersebut.

**Kata kunci:** AS, Indonesia, RRC, kebijakan keamanan, paradigma keamanan, lingkungan strategis, kepentingan strategis, keamanan kawasan, Asia-Pasifik

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Untuk pertama kalinya seorang Presiden AS mengunjungi wilayah Darwin, Northern Territory, Australia. Dalam kunjungan yang dilakukan Presiden Barack Obama pada 15 Nopember 2011 itu, diumumkan keinginan AS meningkatkan keberadaan militernya di wilayah Asia-Pasifik. Bersama dengan PM Australia, Julia Gillard, Obama telah mengumumkan penempatan 2.500 personil marinir AS di pangkalan militer Australia di Darwin.<sup>1</sup> Pasukan marinir ini diharapkan akan bertindak cepat atas masalah-masalah kemanusiaan dan

keamanan di kawasan Asia Pasifik, dan bergerak lebih sering dari dan keluar Northern Territory.

Walaupun dengan sistem rotasi, dilaporkan gelar pasukan marinir AS di Darwin tersebut dilakukan secara permanen. Kehadiran secara permanen ini sebenarnya telah dipertimbangkan beberapa tahun sebelumnya ketika Washington mulai memperkuat komando Pasifik-nya.<sup>2</sup> Gelar pasukan AS secara permanen di Australia ini melengkapi pangkalan mata-mata *Joint Defence Facility* di Pine Gap dekat Alice Springs. Selain barak Robertson di Darwin, lokasi-lokasi lain seperti di Perth di barat Australia mungkin juga akan digunakan oleh pasukan AS. Kehadiran militer AS di Australia akan menambah jumlah pasukan marinir negeri itu yang sudah ada

\* Penulis adalah Peneliti Utama IV/e dan Profesor Riset Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI, dapat dihubungi di alamat e-mail: pptogin@yahoo.com.

<sup>1</sup> Rita Uli Hutapea. "Wow! 2.500 Marinir AS Akan Ditempatkan di Australia," *detikNews*, 16 November 2011, diakses 11 Januari 2012.

<sup>2</sup> "AS Gelar Pasukan Marinir Permanen di Darwin," *Kompas.com*, 11 November 2011, diakses 11 Januari 2012.

sejak lama di Okinawa, Jepang, dan di Guam, sebagai pasukan tempur utama AS di Pasifik. Dalam kesepakatan dengan Australia diungkapkan akan banyak pasukan AS singgah di sana.

Gelar pasukan marinir AS merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Obama yang semakin sering ke kawasan Asia Pasifik belakangan ini. Obama telah beberapa kali ke Indonesia, yaitu Jakarta dan Bali, dan hadir secara langsung dalam pertemuan ASEAN. Pangkalan militer Darwin juga berjarak tidak jauh dengan wilayah Indonesia, yaitu hanya 820 kilometer.<sup>3</sup>

Gelar pasukan AS di Australia merupakan gelar pertama kalinya sejak berakhirnya Perang Viet Nam tahun 1973. Kehadiran militer AS di kawasan ini terus menurun sejak ditutupnya 2 pangkalan militer utamanya di Filipina, yakni Subic Bay dan Clark Field. Karena itu, pemimpin Republik Rakyat China (RRC) berpandangan dengan pengumuman kebijakan keamanan barunya tersebut, AS berupaya melakukan strategi pengepungan baru (*new containment policy*) terhadap RRC, baik secara militer langsung maupun ekonomi.<sup>4</sup> Presiden AS, Obama, sendiri telah mengatakan AS tidak akan pernah melupakan atau meninggalkan kawasan Asia, sekalipun Perang Dingin telah berakhir.<sup>5</sup>

Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) yang kini merupakan anggota Kongres dari Partai Republik dan Co-Chairman US-ASEAN Strategy Commission, William Cohen, dalam kunjungan ke Jakarta mengatakan AS kini memang lebih peduli dengan Asia. Hal ini disebabkan karena ekonomi ASEAN yang terus tumbuh dan menjadikan kawasan Asia Tenggara kian dinamis. Kemudian, RRC telah muncul sebagai kekuatan ekonomi dunia dan semakin kuat perkembangannya. Namun, Cohen menegaskan, dengan alasan

apapun, RRC tidak boleh mendominasi kawasan. Dengan alasan inilah, pemerintah Obama menggeser kebijakan keamanannya dewasa ini, dari fokus di Timur-Tengah, yakni Irak dan Afghanistan, ke Asia Pasifik, agar Asia-Pasifik yang stabil dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Cohen menambahkan, pemerintah AS memperkenalkan strategi baru militernya, karena perang baru diakui masih dapat muncul di kawasan ini kapan saja, jika pengambil keputusan salah perhitungan.<sup>6</sup>

Meningkatnya kehadiran militer AS di Asia-Pasifik dapat dilihat pula dari upaya menjadikan wilayah Australia sebagai pangkalan pesawat pengintai jarak jauh tidak berawak (*drone*). Ijin telah diperoleh, walaupun Menhan Australia mengatakan pilihan basis di Kepulauan Cocos masih diperhitungkan, karena harus ditingkatkan infrastrukturnya dan fasilitasnya. Namun, lokasi ini yang paling ideal untuk memantau jalur pelayaran paling sibuk di dunia dan juga Laut China Selatan.<sup>7</sup> Kepulauan Karang Cocos, dapat dimanfaatkan sebagai pangkalan udara di kawasan Samudera Hindia, Barat Laut Australia, tidak hanya untuk pesawat pengintai berawak, tetapi juga tanpa awak dan senjata, *Global Hawks*.<sup>8</sup> Dalam rangka proyek itu, Wakil Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Urusan Asia Timur dan Pasifik, Kurt Campbell, berada di sana lebih dari seminggu. PM Gillard juga telah mendiskusikan kemungkinan penggunaan Kepulauan Cocos dengan Menhan Panetta. Analis mengatakan Australia merupakan aset strategis AS, sebab, dari sana, AS dapat memantau perkembangan RRC, serta kehadiran dan kepentingannya di Asia-Pasifik.<sup>9</sup>

Tindak lanjut dari perubahan kebijakan keamanan AS diperlihatkan dengan diplomasi ofensif AS di kawasan. Menlu Hillary Clinton, selain telah memanfaatkan forum lain, juga datang ke Indonesia, menemui Menlu

<sup>3</sup> "AS Gelar Pasukan Marinir Permanen di Darwin," *Kompas.com*, 11 November 2011, *loc.cit.*, diakses 11 Januari 2012.

<sup>4</sup> Prayitno Ramelan, "Perseteruan AS dan China di Laut China Selatan," *Seputar Indonesia*, 22 November 2011.

<sup>5</sup> "AS Gelar Pasukan Marinir Permanen di Darwin," *Kompas.com*, 11 November 2011, *loc.cit.*, diakses 11 Januari 2012.

<sup>6</sup> "William Cohen: Ingin Memastikan ASEAN Stabil," *Majalah Tempo*, 22 Januari 2012: 101, diakses 11 Januari 2012.

<sup>7</sup> Fefy Dwi H dan Andika Hendra M, "Australia Basis Drone AS," *Seputar Indonesia*, 29 Maret 2012: 16.

<sup>8</sup> "Australia Bantah Soal Pulau Calon Basis Militer," *Koran Tempo*, 29 Maret 2012: A14.

<sup>9</sup> Fefy Dwi H dan Andika Hendra M, *loc.cit.*

Natalegawa dan Presiden Yudhoyono pada 3-4 September 2012, khusus membahas perkembangan Laut China Selatan dan kerja sama militer.<sup>10</sup> Menlu Clinton menegaskan, "AS percaya tidak ada satu negarapun yang boleh bertindak semaunya meningkatkan ketegangan atau memperjuangkan klaim teritorialnya."<sup>11</sup> Walaupun tidak menyebut tentang RRC, namun penegasan Menlu Clinton diarahkan kepada RRC.<sup>12</sup> Itulah sebabnya, setelah penegasan Menlu Clinton, pemerintah RRC mengeluarkan kecaman kepada AS agar jangan ikut campur dalam sengketa teritorial yang terjadi.<sup>13</sup>

## B. Perumusan Masalah

Pemerintah Indonesia tidak terusik dengan pengumuman Presiden AS Obama tentang perubahan kebijakan keamanan di kawasan. Dalam pandangannya, SBY tidak menunjukkan kekuatiran, dan berpendapat kehadiran pasukan itu dibutuhkan untuk operasi darurat penanggulangan bencana alam, di negara dan kawasan yang rawan terhadap bencana alam. Menteri Koordinator (Menko) Polkam Marsekal (Purn) Joko Suyanto dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, tidak menanggapi hal itu sebagai hal serius, dan ada kaitannya dengan perkembangan kawasan. Alasannya, jika memang ada kaitannya dengan upaya merespons kebangkitan militer RRC di kawasan, AS masih perlu membangun pangkalan bagi armada udara F-22 raptor dan kapal induknya, di luar gelar pasukan marinir secara permanen.<sup>14</sup>

Satu-satunya sikap kritis dari kalangan pemerintah adalah dari Menlu Natalegawa yang mengantisipasi dampak kebijakan AS itu terhadap perkembangan kawasan. Menlu Natalegawa kuatir berdampak meningkatkan ketegangan di Asia Pasifik, karena akan menjadi kawasan itu menjadi perebutan pengaruh

negara-negara besar. Sehingga, reaksi yang provokatif tentu saja dapat menimbulkan kesalingtidakpercayaan antar-negara.<sup>15</sup>

Dengan Filipina, AS tengah merundingkan rencana untuk menempatkan pasukan dan alutsistanya dalam jumlah besar, secara berkala, mengganti istilah permanen, kembali di bekas Pangkalan Subic Bay dan Clark Field. Dari kedua pangkalan tersebut, militer AS dapat menjangkau negara manapun di Asia Pasifik. Sampai pertengahan tahun 2013 saja, telah ada kunjungan 72 kapal perang dan kapal selam AS ke Subic, atau meningkat signifikan dibandingkan selama tahun 2010, yang hanya 51 kali.<sup>16</sup> Peningkatan kehadiran AS di kawasan diikuti dengan merapatnya kapal logistik militer AS di Pelabuhan Cam Ranh, Viet Nam, dan rencana penempatan 4 kapal tempur khusus kawasan pesisir di Singapura. Sehingga, upaya meneliti hubungan perkembangan kebijakan keamanan AS di Asia Pasifik dewasa ini menjadi penting. Hal ini akan menjawab, bagaimana implikasi pergeseran kebijakan keamanan terhadap persepsi ancaman keamanan Indonesia, dilihat dari perspektif para pembuat kebijakan di sektor pertahanan-keamanan?

## C. Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini secara khusus dikontribusikan untuk Komisi 1 DPR yang membidangi masalah luar negeri, keamanan, komunikasi dan intelejen. Lapornya dapat dimanfaatkan untuk rapat-rapat kerja dengan mitra kerja pemerintah terkait, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI, Badan Intelejen Nasional, dan instansi lain yang tugasnya terkait masalah luar negeri dan pertahanan-keamanan.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Pemahaman tentang Ancaman

Yang esensial harus dijelaskan adalah bagaimana persepsi ancaman itu dibangun. Dalam teori yang dibangun kalangan realis,

<sup>10</sup> "Kunjungan Hillary Clinton: AS-Indonesia Bahas Laut Cina Selatan dan Kerja Sama Militer," *Suara Pembaruan*, 3 September 2012: 15.

<sup>11</sup> "Hindari Konflik Wilayah," *Republika*, 3 September 2012: 15.

<sup>12</sup> Arif Hulwan, "AS Berupaya Bendung Pengaruh China di Pasifik," *Media Indonesia*, 2 September 2012: 2.

<sup>13</sup> "Hillary Clinton Puji Indonesia: China Kecam AS Jangan Ikut Campur dalam Sengketa," *Kompas*, 5 September 2012: 8.

<sup>14</sup> "AS Gelar Pasukan Marinir Permanen di Darwin," *Kompas.com*, 11 November 2011, diakses 11 Januari 2012.

<sup>15</sup> "AS di Australia Bukan Ancaman bagi ASEAN," 16 November 2012, <http://us.dunia.vivanews.com/news/read/264838-as-di-australia-buka...diakses> 11 Januari 2012.

<sup>16</sup> Jerome A. Wirawan, "Militer AS Perkuat Eksistensi," *Media Indonesia*, 13 Agustus 2013: 20.

persepsi ancaman dikaitkan dengan persepsi para pengambil keputusan tentang kekuatan. Hal ini logis karena kalangan realis, fokus pada faktor-faktor material (Waltz, 1979). Dalam pandangan ini, negara-negara yang memiliki kekuatan lebih besar cenderung selalu memberikan ancaman kepada negara-negara (tetangga) mereka yang lebih lemah. Sedangkan (varian) realis lainnya, memperluas lagi faktor-faktor yang berkontribusi pada ancaman, misalnya, proximitas geographis dan adanya kapabilitas untuk menyerang (Waltz, 1987).<sup>17</sup>

Di pihak yang berlawanan, kalangan konstruktifis, telah menentang hubungan yang deterministik antara kekuatan dan ancaman. Kalangan konstruktifis, yang dalam analisisnya melihat faktor-faktor non-material --yakni ide-ide, nilai-nilai yang dianut, diadopsi atau mempengaruhi para pengambil keputusan, atau pandangan kultural mereka secara luas-- berpandangan bahwa ide-ide adalah variabel yang krusial dalam menilai tingkat ancaman yang ada. Penelitian-penelitian yang lebih maju mengembangkan analisis yang mengaitkan model formasi identitas dengan persepsi ancaman. Kalangan konstruktifis yang menggunakan model analisis ini mengemukakan indikasi bahwa identitas yang di-*share* bersama menurunkan persepsi ancaman, dan identitas bersama merupakan sebuah hubungan yang dikonstruksikan secara sosial, yang keduanya bervariasi dan dapat dimanipulasi.<sup>18</sup>

Persepsi tentang keamanan nasional menyangkut upaya negara menciptakan rasa aman bagi individu warganya, yang segala kebijakannya didasarkan pada kepentingan nasional, bukan kelompok dan orang per orang.<sup>19</sup> Juga, setiap kebijakan tentang keamanan nasional harus dirasakan semua

warga, mengingat setiap manusia membutuhkan rasa aman dan ingin melanjutkan kehidupannya secara damai. Karena keamanan dan kesejahteraan saling mempengaruhi, ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional akan mengganggu kondisi kesejahteraan sosial, dan sebaliknya, kondisi kesejahteraan nasional yang buruk akan menimbulkan banyak persoalan keamanan nasional. Juga, karena ancaman keamanan nasional dewasa ini semakin beragam, makna keamanan nasional lebih luas dari sekadar pertahanan negara dan upaya menangkalnya. Dalam konteks ini, penyelenggaraan keamanan nasional yang komprehensif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gatra kehidupan berbangsa dan bernegara, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan, yang harus memperhatikan kepentingan nasional dalam pergaulan antar-bangsa atau perkembangan hubungan internasional.<sup>20</sup>

Adapun yang dikategorikan ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional Indonesia, sebagaimana yang disusun dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional yang diusulkan pemerintah, adalah (1) disintegrasi bangsa, (2) terganggunya kerja sama ekonomi internasional, (3) ketidakstabilan ekonomi nasional, (4) intervensi negara lain, (5) kejahatan lintas negara, (6) ketergantungan terhadap negara lain, (7) ancaman terhadap hukum nasional, (8) ancaman terhadap lingkungan hidup, (9) konflik kawasan, (10) ancaman senjata nuklir, kimia, dan biologi, (11) bencana alam dan non-alam, (12) dan tuntutan sistem baru dalam pemerintahan.<sup>21</sup> Dari jenis-jenis ancaman di atas terdapat lebih dari 4 jenis ancaman terkait dengan kehadiran dan interaksi dengan pihak asing, yakni ancaman nomor 2, 3, 4, 7, 9, 11 dan 12. Selanjutnya, dilihat secara lebih khusus, ancaman nomor 2, 4, 9 dan 11 terkait langsung dengan pihak

<sup>17</sup> Lihat, David L. Rousseau, Dan Miodownik, dan Deborah Lux Petrone, "Identity and Threat Perception: An Experimental Analysis," paper presented for annual meeting of the American Political Science Association, S.F, California: 2001.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> "Dasar Penyusunan Norma," *Naskah RUU Keamanan Nasional, draft* yang diajukan pemerintah (Kementerian Pertahanan --Kemenhan), 2011, hal. 18.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 19.

<sup>21</sup> *Naskah Akademik RUU Keamanan Nasional*, yang diajukan pemerintah (*draft* Kemenhan), 2011, hal. 10 *et seq.*

asing. Pada ancaman jenis ke-2, terganggunya kerjasama ekonomi internasional, eskalasinya disebabkan terutama oleh ketidakpastian hukum atau kebijakan pemerintah, dan ketidakpastian jaminan keamanan. Pada ancaman jenis ke-4, campur tangan negara lain, eskalasinya diawali suatu kepentingan negara asing melalui perorangan, kelompok, dan/atau organisasi tertentu dalam mengintervensi kebijakan sistem pemerintahan, termasuk dalam penanggulangan terorisme, yang disertai tekanan terhadap pemerintah. Kemudian, pada ancaman jenis ke-9, konflik kawasan, eskalasinya dapat diawali kegiatan spionase, konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, *spill over conflict*, blokade, pemboman, dan invasi militer. Sedangkan dalam ancaman jenis ke-11, keterlibatan pihak asing, terkait dengan dilakukannya operasi kemanusiaan, karena bencana itu telah mengakibatkan sebagian atau seluruh fungsi pemerintahan di wilayah yang terkena bencana, terganggu, dan mengakibatkan jatuhnya korban manusia dalam jumlah besar, yang tidak dapat ditangani dengan cara-cara biasa.<sup>22</sup>

Persepsi ancaman keamanan Indonesia lebih rinci lagi dirumuskan sebagai masalah keamanan nasional yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri, yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Di sini, penggunaan istilah dan/atau menggambarkan bahwa ancaman keamanan nasional yang datang dari luar negeri tidak selalu berdiri sendiri. Selain itu, maknanya bisa didahului oleh upaya penggerogotan sasaran dari dalam, sebagaimana yang diidentifikasi para ahli dalam 'perang generasi keempat'.<sup>23</sup> Namun, ancaman militer negara lain selalu merujuk pada adanya gangguan terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan nasional, yang menjadi tanggung jawab TNI, dibantu dengan komponen lainnya sesuai kompetensi.

Dalam hubungannya dengan persepsi ancaman dan upaya meresponsnya, yang dimaksud dengan kebijakan operasional dan strategi militer dalam perspektif kepentingan

Indonesia adalah penentuan dan penetapan tentang pembangunan, pembinaan, dan penggunaan kekuatan TNI berdasarkan perkembangan lingkungan strategis.<sup>24</sup> Terkait matra laut, masalah keamanan laut tidak hanya merupakan masalah penegakan hukum, namun juga kondisi laut yang aman digunakan para penggunanya dari berbagai negara, dan bebas dari segala bentuk ancaman atau gangguan. Termasuk gangguan ini adalah ancaman militer, pembajakan, perompakan, sabotase obyek vital, aksi teror bersenjata di laut, dan ancaman navigasi, SDA-nya, serta pelanggaran hukum.

Walaupun pemahaman atas keamanan nasional sudah berkembang luas, tujuan keamanan nasional tetap tidak dapat dipisahkan dengan segala tindakan untuk mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial, kebebasan politik, dan promosi keamanan kawasan.<sup>25</sup> Analisis studi keamanan seperti Barry Buzan, sejak dini telah memperkenalkan pemahaman atas konsep keamanan dalam makna yang lebih kompleks.<sup>26</sup> Sementara, kalangan realis, sejak dulu tetap menekankan masalah keamanan nasional sebagai masalah pertahanan atau militer, sehingga fungsi utama negara adalah melindungi penduduknya dari setiap ancaman luar yang membahayakan.<sup>27</sup> Dalam perspektif Indonesia, mantan Menhan Juwono Sudarsono, melihat keamanan nasional mencakup pertahanan negara, yang harus dikordinasikan oleh pemerintah nasional untuk menegakkan kedaulatan bangsa, keselamatan, kehormatan, dan keutuhan NKRI.<sup>28</sup>

Jadi, walaupun sudah berkembang sebagai konsep yang komprehensif, keamanan

<sup>24</sup> "Penjelasan RUU Keamanan Nasional," draft Kemenhan, 2011, hal. 10, *op.cit.*

<sup>25</sup> Lean le Roux, "Defining defence requirements: Force design considerations for the South African National Defense Force," *African Security Review*, Vol. 8, No. 5, 1999, hal. 1.

<sup>26</sup> Lihat, misalnya, Barry Buzan, *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, New York, Harvester Wheatsheaf, 1991.

<sup>27</sup> Lihat untuk ini, misalnya, Eugene J. Meehan, John P. Roche, Murray S. Stedman, Jr. *The Dynamics of Modern Government*, New York: McGraw-Hill, 1966: hal. 365-472.

<sup>28</sup> Juwono Sudarsono, Materi Rapat di Cikeas, Bogor, 11 Pebruari 2001, dalam *Naskah Akademik RUU Keamanan Nasional*, yang diajukan pemerintah (draft Kemenhan), 2011, hal. 10 *et seqq*, *loc.cit.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

nasional tetap merupakan bagian penting yang harus diperhatikan, bersama-sama keamanan insani (*human security*), mengingat ia merupakan respons atas ancaman keamanan negara dan integritas wilayah nasional. Di sisi lain, keamanan nasional berdimensi militer, dalam bentuk ancaman maupun solusinya, walaupun tidak mengenyampingkan solusi diplomatik yang efektif. Ini berarti, dalam perspektif Indonesia, sarana utama untuk meresponsnya adalah militer.<sup>29</sup>

Selanjutnya, perlu dipahami bahwa kepentingan keamanan nasional selalu berubah. Ia dapat dilihat dari 2 perspektif, yakni, *pertama*, apa yang disebut sebagai kepentingan keamanan nasional yang berpijak dari ancaman yang sedang, atau diantisipasi akan mengancam upaya pencapaian tujuan nasional (*issue-based national security, threat-based national security*). Contohnya adalah krisis ekonomi, gangguan separatisme, pemberontakan bersenjata dan lain-lain. Sedangkan *kedua* adalah yang dikenal sebagai *interest-based national security*, yakni keamanan nasional sebagai sebuah kepentingan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan nasional itu, antara lain, mempertahankan integritas wilayah, kedaulatan nasional, dan seterusnya, yang lebih bersifat mendasar dan jangka panjang dibandingkan dengan perspektif pertama.<sup>30</sup>

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptis-analitis. Hasilnya mempresentasikan temuan riset kepustakaan dan lapangan dari berbagai wawancara mendalam. Analisis atas berbagai temuan itu dilakukan selanjutnya sebagai bagian dari laporan penelitian akhir yang utuh.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan teknik wawancara mendalam melalui kunjungan ke lapangan (*field research*). Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai tugas pokok dalam masalah pertahanan-keamanan, seperti Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), Angkatan Darat (AD). Untuk matra laut, pihak-pihak yang diwawancarai meliputi pimpinan Pangkalan Utama AL (Lantamal) dan Armada Barat dan Timur. Untuk matra udara, pihak-pihak yang akan diwawancarai meliputi pimpinan Landasan Udara (Lanud). Sedangkan untuk matra darat, pihak-pihak yang diwawancarai mencakup pimpinan Komando Distrik Militer (Kodim).

## 3. Lokasi Penelitian dan Waktu

Penelitian lapangan dilakukan di wilayah Provinsi Papua, tempat berlokasi perusahaan tambang milik AS yang sangat bermasalah, yakni PT. Freeport. Provinsi ini menjadi perhatian pemerintah AS dan letaknya tidak jauh dari Darwin, Northern Territory, Australia, basis penempatan pasukan marinir AS. Provinsi lainnya adalah Nusa Tenggara Timur, yang juga tidak jauh dari Darwin, yang memiliki perusahaan tambang milik AS yang sering dilanda aksi unjuk rasa.

## 4. Teknik Analisis Data

Data tertulis di-*cross-check* dengan informasi dari wawancara mendalam. Data yang diperoleh dari berbagai macam sumber tersebut, apakah itu primer maupun sekunder, dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, dibuat kesimpulannya.

## II. Hasil dan Pembahasan

### A. Menilai Respons Indonesia

Sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis di kawasan, di Indonesia, Kajian Pertahanan Strategis (*Strategic Defense Review –SDR*) yang dibuat 2 tahun sekali, dan

<sup>29</sup> Hasnan Habib, "Globalisasi dan Keamanan Nasional Indonesia," makalah disampaikan kepada Komisi Politik DPA, Jakarta, 28 Januari 2000.

<sup>30</sup> Edy Prasetyono, "Sistem Keamanan Nasional," makalah penjelasan Naskah RUU Keamanan Nasional, *draft* Kemenhan, 2011.

*White Book* (Buku Putih), yang memuat persepsi ancaman yang dihadapi Indonesia hingga beberapa tahun ke depan, masih dilakukan, dan dijadikan acuan bagi perencanaan strategis pengadaan alutsista oleh Kemenhan, terutama Dirjen Strategi Pertahanan (Strahan), dan pengembangan industri pertahanan.<sup>31</sup> Karena itu, pengadaan/pembuatan pesawat pengintai nir-awak (*drone*) untuk meng-counter ancaman kegiatan *drone* milik militer AS sudah ada dalam perencanaan strategis di Kemenhan.

Namun, masih lemahnya penyusunan persepsi ancaman keamanan Indonesia melalui SDR yang menghubungkannya dengan pengadaan alutsista kelihatan dari belum standarnya alutsista yang dimiliki militer Indonesia. Perbedaan persepsi ancaman keamanan telah berakibat pada perbedaan dalam standar alutsista yang digunakan dewasa ini oleh satuan-satuan TNI. Sebab, jika persepsi ancaman yang ada sama, hal itu akan menghasilkan pengadaan dan penggunaan alutsista yang standar oleh angkatan perang sebuah negara. Di luar itu, proses pengadaan barang dan jasa yang belum transparan dan menjalankan prinsip-prinsip *good governance* merupakan masalahnya.

Sementara, dari perspektif matra udara Indonesia, berbagai kejadian di lapangan menunjukkan rawannya wilayah Kepulauan Indonesia dari penyusupan dan pelanggaran wilayah berbagai kapal dan pesawat asing. Kasus pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat militer AS (yang tidak memiliki ijin lintas atau *security clearance*) di atas Bawean tidak berhenti di situ saja,<sup>32</sup> karena kemudian terjadi kasus serupa di atas Sumatera dan Kalimantan, yang dapat diusir dengan pengawalan pesawat AURI melalui wilayah udara Morotai. Setelah kasus ini, terjadi pelanggaran kedaulatan wilayah udara Indonesia oleh pesawat sipil, yang melintas dari

Honolulu dan Korsje menuju Singapura. Walaupun tidak diketemukan adanya misi pengintaian (mata-mata) oleh AS, tetapi aksi pelanggaran wilayah udara secara sengaja oleh pilot berpengalaman AS itu, menyisakan pertanyaan, mengapa kegiatan itu sampai perlu dilakukan.<sup>33</sup> Namun, sekalipun kekuatan AURI dapat memaksa turun pesawat-pesawat pelanggar kedaulatan wilayah RI tersebut, yang terpenting adalah bahwa wilayah Kepulauan Indonesia, termasuk di perairan (laut), selalu menarik dan menggoda pihak asing untuk dapat melintasinya secara ilegal, walaupun ada yang terdeteksi. Ini belum termasuk laporan kecurigaan dari petugas atau perwira di lapangan mengenai adanya kapal-kapal dan pesawat-pesawat asing yang melanggar wilayah namun tidak terdeteksi, karena keterbatasan kuantitas dan kualitas peralatan TNI yang ada.<sup>34</sup>

## B. Perbedaan Persepsi dan Dampaknya

Latar belakang pendidikan, pengalaman, dan penguasaan pengetahuan kematraan, serta pemahaman tentang keamanan strategis dan perkembangan lingkungan strategis, serta pengetahuan lapangan dan penguasaan atas informasi yang berkembang mempengaruhi cara pikir dan respons perwira TNI dalam menanggapi gelar pasukan marinir AS di Darwin. Karenanya, dapat dipahami, penilaian Danlanal Biak Kol (Mar) Prasodjo yang berpendapat bahwa berita tentang gelar pasukan marinir AS di Darwin terlalu dibesar-besarkan oleh politisi dan media. Sehingga, hal itu menurut beliau tidak perlu dikuatirkan, karena merupakan perkembangan yang biasa dalam kerja sama bilateral, yakni antara Australia dan AS.<sup>35</sup>

Respons yang jauh lebih datar diperlihatkan perwira pengambil keputusan di lapangan, yakni TNI-AD. Mereka tidak hanya

<sup>31</sup> FGD "Revitalisasi Industri Pertahanan Indonesia dan Standarisasi Kebutuhan TNI," dan tanya jawab di P3DI pada 24 Mei 2012 dengan Kol (L), Taufik Arief, ST, MM, mantan Kasubdit Pertahanan dan sekarang Kabag TU Dukungan Menteri Setjen Kemhan.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Letkol (Penerbang), Djoko Winarto, Danlanud El Tari NTT, di Kupang, pada 2 Oktober 2012.

<sup>33</sup> Teddy Rumengan. "TNI AU Tahan Pilot Ambon." *Jurnas.com*, 2 Oktober 2012, diakses pada 2 Oktober 2012; "Melintas Wilayah Tanpa Izin, Pilot AS Ditahan di Balikpapan," *Suara Pembaruan.com*, 2 Oktober 2012, diakses 2 Oktober 2012.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Danlanud (Komandan Pangkalan Udara) Manuhua, Letkol (Penerbang) Djoko Hadi Purwanto di Lanud Biak, pada 31 Mei 2012.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Danlanal (Komandan Pangkalan Angkatan Laut), Biak, Kol. (Marinir) Prasodjo di Markas Komando (Mako) Danlanal, Biak pada 31 Mei 2012.

kurang terinformasikan dengan perubahan lingkungan strategis, namun juga tidak berminat atau ingin tahu dengan pemikiran dan langkah apa yang harus disiapkan untuk merespons segala kemungkinan yang terjadi dengan penggunaan basis militer Australia oleh AS dan penempatan marinirnya di Darwin. Mereka bukan hanya tampak belum menganggap penting penyiapan penanganan kasus skenario terburuk, tetapi tidak berniat membicarakan dan ingin tahu.<sup>36</sup> Sebab, permohonan wawancara mengenai masalah dimaksud ditolak, dan yang lebih buruk, dicurigai sebagai upaya mencari uang.<sup>37</sup> Tentu saja, sikap seperti ini kontraproduktif dengan dipertahankannya Korem pasca-1998, yang justifikasi tugas, pokok, dan fungsi teritorialnya juga untuk mengantisipasi ancaman dari luar.

Pandangan yang sangat kritis terhadap paradigma politik luar negeri Indonesia yang dipakai sejak lama, yakni politik bebas aktif dan perlunya kemampuan Indonesia untuk dapat "mengayuh di antara 2 karang", yang lahir di awal periode Perang Dingin dan diintroduksi oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, muncul dalam wawancara dengan petinggi militer dari lingkungan AU, antara lain, Danlanud Biak dan Danlanud Kupang.<sup>38</sup> Tetapi, penggunaan prinsip ini pada periode pasca-Perang Dingin dengan kondisi Indonesia yang serba minimalis dan seperti tanpa nakhoda, dinilai sama saja Indonesia tidak mempunyai kemampuan

memadai untuk merespons dengan tepat seperti diharapkan terhadap kebijakan keamanan baru AS. Karena, TNI tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk mencegah agresifitas militer China, akibat ketergantungan Indonesia pada investasi dan pasar RRC. Indonesia juga tidak bisa mencegah atau menahan gerak maju militer AS, karena keterbatasan teknologi dan anggaran pertahanan.

Sementara, dari kalangan penyusun strategi pertahanan di Kemhan diungkapkan perlunya Indonesia bisa memanfaatkan posisinya di tengah, untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari 2 negara adidaya yang tengah berkontestasi di kawasan. Sehingga, Indonesia dapat ikut meredakan ketegangan (*détente*), dengan menggunakan *soft power* melalui jalur diplomasi, dengan mengundang perwira RRC untuk ikut Sesko, Lemhannas, dan lain-lain, serta terlibat dalam latihan militer bersama, seperti yang sudah dilakukan Indonesia dengan militer AS selama ini.<sup>39</sup> Namun, masalahnya, *soft power* Indonesia belum efektif dan maksimal berpengaruh, jika belum memiliki kepemimpinan nasional yang kuat dan perkembangan ekonomi yang mendukung peningkatan kapasitas dan kinerja pertahanan negara.

Sehingga, tetaplah mengejutkan, Danlanud Biak, Letkol (Penerbang) Djoko Hadi Purwanto, dan juga Danlanud Kupang, Letkol (Penerbang) Djoko Winarto, mengatakan bahwa upaya menjalankan politik bebas-aktif yang selalu menunjukkan sikap di tengah, memperlihatkan sikap dan tujuan Indonesia yang tidak jelas.<sup>40</sup> Alasannya, Indonesia dinilai dapat memanfaatkan kekuatan yang lebih besar dan menguntungkan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Sehingga, tidak ada salahnya, Indonesia mendukung kebijakan AS untuk mendapat manfaat yang tinggi di bidang ekonomi, politik, pendidikan, militer dan lain-lain. Jadi, walaupun AS ingin mencari dan

<sup>36</sup> Hal ini tercermin dalam permohonan wawancara dengan kalangan Korem 1611/WS, Kupang, yang kurang direspons baik, karena dianggap tidak penting untuk dibicarakan. Yang lebih tidak menggembirakan lagi adalah keterangan bahwa pimpinan Korem tidak mengetahui mengenai dan berminat membicarakan perubahan lingkungan strategis, walaupun terkait dengan fungsi teritorialnya, apalagi di kawasan terdekat dengan negara tetangga, Australia, yang menjadi basis marinir AS. Sekalipun dicoba melakukan diskusi dengan perwira teritorial yang ada mengenai masalah dimaksud, tidak diperoleh informasi yang diharapkan. Jawaban perwira yang ada sangat minimalis (Wawancara dengan I. Wayan I, Staf Teritorial Korem 1611/WS, Kupang, NTT, di Kupang, pada 2 Oktober 2012 dan Wawancara dengan Mayor (AD) Yansori, Staf Teritorial Korem 1611/WS, Kupang, NTT, di Kupang, pada 2 Oktober 2012).

<sup>37</sup> Kedatangan penulis ditolak oleh Danrem Biak, Kol. Lubis, pada 31 Mei 2012, padahal surat permohonan wawancara resmi dengan kop surat formal dari institusi telah dikirimkan via faksimili jauh hari sebelumnya.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Danlanud (Komandan Pangkalan Udara) Manuhua, Letkol (Penerbang) Djoko Hadi Purwanto di Lanud Biak, Biak, pada 31 Mei 2012; Wawancara dengan Letkol (Penerbang), Djoko Winarto, Danlanud El Tari NTT, di Kupang, pada 2 Oktober 2012.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Dirjen Strategi Pertahanan, Mayjen Pugh Santoso, ST, M.Sc. di Kementerian Pertahanan pada 12 Juni 2012.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Danlanud (Komandan Pangkalan Udara) Manuhua, Letkol (Penerbang) Djoko Hadi Purwanto di Lanud Biak pada 31 Mei 2012.

membangun pangkalan militer di Indonesia, Indonesia boleh saja mengijinkannya untuk tujuan pragmatis, yaitu meraih devisa yang masuk, lapangan kerja yang tersedia, terutama bagi penduduk lokal, dan untuk pengembangan wilayah, tersedianya jaminan keamanan wilayah, dan seterusnya. Sedangkan dampak negatif yang terjadi harus dapat dicegah dan dilokalisasi, misalnya, munculnya tempat hiburan dan pekerja seks komersial. Ia lebih jauh berpendapat, untuk dapat merespons ancaman keamanan yang datang dari negara mana saja secara tepat, diperlukan kesamaan persepsi atas ancaman yang muncul dari para pengambil keputusan hankam, sekalipun presidennya berbeda, termasuk di DPR.

Adanya perbedaan penilaian atas perkembangan lingkungan strategis di kawasan, diakui oleh pembuat kebijakan di Ditjen Strahan, Kemhan. Namun, sebagaimana diungkapkan Dirjen Strahan, keterbatasan anggaran militer telah membuat keengganan, atau, jika tidak, keterbatasan, dalam merespons perkembangan lingkungan strategis. Sehingga, diskusi-diskusi yang ada dalam menyusun persepsi ancaman keamanan, yakni di forum SDR, selalu berujung pada sekedar upaya memenuhi kebutuhan pertahanan minimal (*minimum essential forces*).<sup>41</sup> Pendapat di kalangan perwira lapangan AL, yang tupoksinya harus merespons perubahan lingkungan strategis di kawasan operasionalnya, dalam hal ini Asia Pasifik, senada. Anggaran militer, yang hanya mampu memenuhi *minimum essential forces*, yang menyebabkan keterbatasan pemenuhan alutsista dan dukungan biaya operasional sehari-hari, membuat mereka tidak bisa berbuat banyak untuk dapat menyusun rencana strategis yang maksimum dan efektif.<sup>42</sup>

Selain itu, perlu dicatat, perspektif perwira AL dan AU dalam menilai ancaman terhadap hankamnas juga cukup rasional dan kritis. Sementara, alutsista mereka untuk dapat mendeteksi ancaman musuh di lapangan, yang

berasal dari negara tetangga dan luar kawasan sangat terbatas. Mereka, baik di bagian radar maupun pengintaian (Kosekhanudnas), sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi diri dari serangan musuh, apalagi untuk menindak musuh yang mengancam, dengan menggerakkan kekuatan langsung dari basis mereka masing-masing, termasuk dari lanal ataupun lanud mereka,<sup>43</sup> kecuali untuk Lanud Makassar, yang diperlengkapi alutsista.

### C. Memahami Respons RI

Sejak masa kemerdekaan, dasar dari kebijakan luar negeri yang dijalankan pemerintah RI adalah politik bebas dan aktif. Artinya, pemerintah RI bebas menjalankan kebijakan luar negerinya kapanpun dan di mandala manapun. Ia tidak terikat atau tergantung pada satu negara, kekuatan atau blok yang ada. Di lain sisi, secara simultan, pemerintah RI terus aktif memperjuangkan perdamaian dunia di berbagai penjuru dunia. Setelah beberapa dasawarsa, dalam era pemerintahan SBY, dicanangkan penggunaan *soft power*, sebagai alternatif dan cara yang cerdas untuk memperjuangkan misi politik luar negeri RI di tengah keterbatasan sumber daya yang ada. Pendekatan ini tidak mengedepankan kekuatan fisik dan senjata, tetapi penampilan dan kinerja yang santun, namun disegani, sebagaimana karakter dan kinerja individual pemimpin nasionalnya, Presiden SBY, sehingga ia sering mengungkapkannya sebagai langkah mencari kawan sebanyak-banyaknya, dan sebaliknya, nirmusuh (*thousand friends and zero enemy*).

Menlu Marty Natalegawa mendeskripsikan kebijakan luar negeri RI di bawah SBY sebagai kebijakan yang selalu berupaya menjaga keseimbangan di tengah-tengah dinamika yang terus berlangsung (*dynamic equilibrium*) di kawasan Asia-Tenggara. Ini seperti membela kebijakan

<sup>41</sup> Wawancara dengan Dirjen Strategi Pertahanan, Mayjen Pugh Santoso, ST, M.Sc. di Kementerian Pertahanan pada 12 Juni 2012.

<sup>42</sup> Komunikasi peneliti industri pertahanan P3DI (Indra Pahlevi dkk) dengan kalangan Armatim di Pangkalan Armatim Surabaya, pada Mei 2012.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Perwira Kosekhanudnas (Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional) IV di Markas Komando (Mako) Kosekhanudnas, Biak, pada 31 Mei 2012; Wawancara dengan Danlanud (Komandan Pangkalan Udara) Manuhua, Letkol (Penerbang) Djoko Hadi Purwanto di Lanud Biak pada 31 Mei 2012; Wawancara dengan Letkol (Penerbang), Djoko Winarto, Danlanud El Tari NTT, di Kupang, pada 2 Oktober 2012.

Presiden SBY, dengan menggambarkannya sebagai kebijakan luar negeri Indonesia yang tidak pasif atau diam sama sekali, tetapi jauh dari sikap agresif terhadap negara lain, tanpa manuver unjuk kekuatan (*show of force*) di lapangan. Wajar saja, karena kondisi kekuatan militer Indonesia hanya dapat memenuhi kebutuhan mendukung pengerahan kekuatan yang minimal, mengingat dukungan anggaran yang sangat terbatas.

Langkah yang diambil Presiden SBY dinilai membuat sikap Indonesia tidak jelas, dan yang lebih buruk lagi, lemah, karena dianggap sebagai indikasi dari kelangkaan daya tawar. Sementara, kebijakan *soft power* tidak bisa dijalankan efektif, karena harus didukung kekuatan ekonomi dan militer yang tangguh, agar Indonesia disegani lawan. Pakar hubungan internasional, Aleksius Jemadu, telah mengingatkan, bahwa kebijakan luar negeri yang mengedepankan keseimbangan yang dinamis harus dijalankan dengan hati-hati. Ia tidak percaya pada model keseimbangan kekuatan. Faktor keseimbangan kekuatan (yang dinamis) hanya merupakan ilusi, sehingga ia tidak percaya dengan model tersebut. Ia mengingatkan jangan percaya begitu saja negara besar yang kuat akan bermain halus dalam kebijakan keamanan, terkait kepentingan strategis mereka.<sup>44</sup>

Kalangan dalam AL dan AU Indonesia sejauh ini telah sangat prihatin dengan kemampuannya dalam menghadapi ancaman keamanan nasional. Menurut mereka, pembangunan kekuatan pertahanan negara selama ini tidak memperoleh prioritas dan arah yang jelas, dengan kondisi alutsista dan kesejahteraan prajurit yang memprihatinkan. Ini maknanya, aparat di lapangan menyadari tidak siap untuk merespons ancaman militer yang datang dari luar, mengingat kemampuan mobilitas alutsista dan pasukan tempur yang tidak mencukupi.<sup>45</sup> Mereka juga telah mengidentifikasi bahwa invasi militer dalam

skala besar tidak akan dilakukan negara lain, tetapi dalam skala kecil, atau secara terselubung, dengan didukung teknologi canggih.

Sebenarnya, di luar ini, soal peningkatan kemampuan intelijen strategis untuk melakukan deteksi dini, identifikasi, dan evaluasi perkembangan lingkungan strategis serta kontra intelijen, infiltrasi dan subversi, telah menjadi perhatian. Namun, pertanyaannya, mengapa tidak ada respons terhadap perubahan fokus kebijakan keamanan AS di kawasan Asia-Pasifik, terutama penempatan pasukan marinir AS di Darwin? Sehingga, jelas, terdapat persepsi dan respons yang berbeda terhadap ancaman keamanan yang datang dari perkembangan strategi keamanan AS di Asia-Pasifik. Jika Panglima TNI secara individual meresponsnya dengan sikap dingin, kalangan TNI-AL, dan AU, tidak demikian. Ini tercermin dari adanya keputusan penempatan pesawat-pesawat canggih AU di Papua pada awal Maret 2012.<sup>46</sup> Sebelumnya, sudah dibicarakan adanya keinginan AU melalui Kementerian Pertahanan untuk membeli pesawat pengintai tidak berawak dengan teknologi modern produk Israel. Munculnya reaksi penentangan dari kalangan konservatif Islam di parlemen dan masyarakat membuat wacana ini lenyap.

Sayangnya, kesadaran atas adanya ancaman yang rawan di mata laut tidak diikuti perkembangan yang setara dalam peningkatan kapasitas AL Indonesia. Seperti diungkapkan Menhan Purnomo Yusgiantoro, kekuatan alutsista TNI AL baru bisa ditambah dalam kurun waktu 5 tahun belakangan dengan 14 kapal cepat rudal (KCR), untuk memperkuat satuan-satuan patroli laut dan produk industri pertahanan dalam negeri yang tengah direvitalisasi lewat UU penyusunan sebuah UU.<sup>47</sup> Semua ini alutsista itu diproduksi antara tahun 2010-2014, dan didanai perbankan dalam negeri.

<sup>44</sup> "Indonesia Diminta Jangan Bersikap Naif" dan "Kebijakan Luar Negeri Indonesia," *Kompas*, 29 Februari 2012: 12.

<sup>45</sup> Salim, 2009, *loc.cit.*: 4.

<sup>46</sup> *Running text* berita Metro TV Malam, 5 Maret 2012.

<sup>47</sup> "TNI AL Mendapatkan 14 Kapal Baru," *Kompas*, 17 Februari 2012: 5.

Selanjutnya, tampak bahwa kebijakan militer Indonesia kelihatan parsial, tidak responsif atas ancaman keamanan yang muncul dan dihadapi Indonesia, khususnya dalam pengadaan dan peningkatan alutsistanya. Marinir TNI-AL Indonesia, misalnya, pada triwulan ke-2 tahun 2011 merencanakan untuk menambah 7 perangkat senjata anti-serangan udara baru senilai US\$ 15 juta, yang telah direncanakan dipasang di sekeliling Istana Negara, untuk pengamanan obyek vital itu dari ancaman serangan udara.<sup>48</sup> Jika dikaitkan dengan perkembangan lingkungan strategis dan eksisnya ancaman keamanan baru, seharusnya, pengadaan alutsista baru dan penempatannya haruslah merespons hal itu. Sebab, ancaman keamanan terhadap kedaulatan wilayah tidak akan dilakukan kekuatan asing terhadap Kepala Negara dan tempatnya bekerja. Ancaman keamanan langsung yang harus direspons adalah infiltrasi dan invasi terbatas pasukan asing. Sehingga, yang relevan adalah pengadaan dan peningkatan alutsista untuk tindakan pencegahan dini, seperti radar dan pesawat pengintai berteknologi tinggi, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas pasukan tempur terkait di lapangan, yakni marinir.

Dengan kata lain, perubahan strategi keamanan AS di Asia-Pasifik belum direspons secara tepat. Kementerian Pertahanan, yang masih didominasi kalangan AD, seperti jalan sendiri dalam memutuskan alutsista baru yang harus segera dibeli. Akibatnya, muncul debat mengapa Tank Leopard 2A6 dari Jerman yang harus dibeli, dan bukan tank jenis medium. Selain dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan geografis mandala perang Indonesia dan tidak ada dalam rencana strategis (renstra),<sup>49</sup> pembelian itu menunjukkan ketidaktepatan dalam mengambil keputusan. Sebab, seperti diungkapkan direktori senjata militer modern, tank-tank besar yang digelar Malaysia di sepanjang perbatasan dengan Indonesia di Kalimantan, yang menjadi motivasi pilihan

pembelian Tank Leopard tersebut, dapat ditangkal dengan meriam atau rudal anti-tank, termasuk RPG-29, TOW, dan LOSAT berkecepatan hipersonik.<sup>50</sup> Sehingga, sesuai dengan kondisi geografis Indonesia dengan banyak pulau, luasnya perairan, dan panjangnya garis pantai, TNI seharusnya fokus pada pembangunan kekuatan maritim (AL), yang didukung dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas (alutsista) AU.

Tetapi, AL dan AU seperti harus memutuskan sendiri-sendiri upaya memenuhi alutsista yang mendesak, seperti dalam rencana pengadaan 4 kapal selam dan pembangunan pangkalannya di Teluk Palu, Sulawesi Tengah,<sup>51</sup> serta kapal cepat rudal Trimaran KRI Klewang 625, yang merupakan kapal perang berteknologi siluman, yang tidak terdeteksi radar,<sup>52</sup> serta (untuk AU) pesawat 16 pesawat tempur taktis Super Tucano EMB 314 asal Brasil.<sup>53</sup> Itulah sebabnya, muncul penilaian, pemerintah seperti belum memetakan terlebih dulu potensi ancaman keamanan bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan.<sup>54</sup> Respons TNI terhadap pembangunan AL yang lebih kuat masih lambat, mengingat Menhan baru mengungkapkan bahwa pemerintah SBY baru akan mengusulkan pengadaan tambahan selusin kapal selam tahun 2024, atau lebih satu dasawarsa dari sekarang.<sup>55</sup>

### III. Kesimpulan

Sulit menutupi keterkaitan perkembangan lingkungan strategis di Asia Pasifik dengan peralihan fokus kebijakan militer AS di kawasan. Peralihan fokus ini tidak hanya dipengaruhi eskalasi ketegangan di Laut China Selatan, namun juga persepsi kian terancamnya kepentingan AS di Indonesia, negara terbesar di

<sup>48</sup> "Marinir Beli Senjata Pertahanan Udara dan BMF-3," *Koran Tempo*, 16 Mei 2011.

<sup>49</sup> "DPR Setujui Beli Tank Medium," *Kompas*, 24 Agustus 2012: 8.

<sup>50</sup> Ninok Leksono, "Tank dan Senjata Penangkalnya," *Kompas*, 5 September 2012: 15.

<sup>51</sup> "TNI Bangun Pangkalan Kapal Selam," *Suara Pembaruan*, 13 Agustus 2012: 3.

<sup>52</sup> "Kapal Siluman Lengkapi TNI AL," *Kompas*, 1 September 2012: 5.

<sup>53</sup> "Super Tucano Perkuat Pertahanan Indonesia," *Seputar Indonesia*, 2 September 2012.

<sup>54</sup> Ahmad Reza S., "Kemhan Geber Alutsista: Pemerintah diminta memetakan terlebih dahulu potensi ancaman keamanan bangsa," *Republika*, 16 Agustus 2012: 2.

<sup>55</sup> "TNI expects stronger navy fleet by 2024," *the Jakarta Post*, 30 August 2012: 4.

Asia Tenggara yang berdekatan letaknya dengan basis pasukan marinir AS di pangkalan militer Darwin. Sikap pemerintahan SBY dan Menko Polhukam yang tidak mempertanyakan perubahan kebijakan keamanan AS yang berorientasi ke Asia-Pasifik, dipengaruhi pula oleh (semakin) akrab dan dekatnya hubungan pemerintahan SBY dengan AS dewasa ini.

Kemudian, tampak perbedaan pandangan yang jelas antara pembuat kebijakan di pucuk tertinggi pemerintahan dengan tingkat pelaksana yang lebih rendah di lapangan, terutama yang berasal dari kalangan militer, dalam menilai perkembangan lingkungan strategis dan mempersepsikan ancaman yang muncul, yang harus direspon oleh negara. Sikap pimpinan tertinggi pemerintahan Indonesia yang tidak memperlihatkan kekuatiran apapun atas peningkatan kehadiran AS di kawasan Asia-Pasifik, sehingga tidak muncul responsnya dalam penyusunan persepsi ancaman keamanan, bisa saja dilihat sebagai bagian dari menerapkan politik luar negeri *dynamic equilibrium*. Tetapi, akan buruk sekali, sikap pemerintah yang tidak jelas, dibaca sebagai refleksi dari sikap Presiden SBY yang peragu, lambat, dan sering kali tanpa sikap, seperti yang terlihat dalam tahun-tahun periode kepresidenan sebelumnya, akibat tidak ingin mengambil resiko. Ini dapat pula dimaknakan sebagai tidak ada respons dan kerja untuk menyikapi perkembangan lingkungan strategis di sekitarnya.

Dengan penempatan pasukan marinirnya di Darwin serta kehadiran dan manuver kapal-kapal perangnya yang semakin intens, paling tidak AS ingin memperlihatkan kehadiran angkatan perangnya secara nyata dan tegas di kawasan Asia-Pasifik. Bentuk kehadiran militer AS seperti ini di kawasan ini akan membuat RRC berhati-hati dalam memperlihatkan agresifitas militernya di kawasan, khususnya terhadap negara-negara kecil yang bersandar pada payung keamanan AS. Sementara, kedekatan hubungan Indonesia dengan AS di bawah pemerintahan SBY mempengaruhi sikap pasifnya dalam merespons perkembangan lingkungan strategis, khususnya penempatan pasukan marinir AS di Darwin, Australia, yang tidak jauh letaknya dari (perbatasan terluar) Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Brown, David L. (2001). *Practice-Research Engagement and Civil Society In a Globalizing World*. Washington DC and Massachussets: Civicus and the Hauser Center.
- Buzan, Barry. (1991) *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, New York, Harvester Wheatsheaf.
- Buzan, Barry, Waever, Ole dan de Wilde, Jaap. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*, London: Lynne Rienner.
- Liji, Liang. (2012). *Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis: 2.000 Tahun Perjalanan Hubungan Tiongkok-Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Meehan, Eugene J, John P. Roche, Murray S. Stedman, Jr. (1966). *The Dynamics of Modern Government*, New York: McGraw-Hill.
- Miller, George. (2012). *Indonesia Timur Tempo Doeloe: 1544-1992*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Samantho, Ahmad Y. dan Abdurahman, Oman et. al. (2011). *Peradaban Atlantis Nusantara*. Jakarta: Ufuk Press.

### Makalah:

- Habib, Hasnan, "Globalisasi dan Keamanan Nasional Indonesia," makalah disampaikan kepada Komisi Politik DPA, Jakarta, 28 Januari 2000.
- Prasetyono, Edy, "Sistem Keamanan Nasional," makalah penjelasan *Naskah RUU Keamanan Nasional*, 2011.
- \_\_\_\_\_. "Masalah-masalah Bidang Pertahanan Keamanan," Jakarta, CSIS.
- Rousseau, David L., Miodownik, Dan dan Lux Petrone, Deborah, "Identity and Threat Perception: An Experimental Analysis," paper presented for annual meeting of the American Political Science Association, S.F., California, 2001.
- Sudarsono, Juwono, Materi Rapat di Cikeas, Bogor, 11 Pebruari 2007.

### Jurnal:

- Roux, Lean le, "Defining defence requirements: Force design considerations for the South African National Defense Force," *African Security Review*, Vol. 8, No. 5, 1999.

### Majalah:

- Cohen, William, "Ingin Memastikan ASEAN Stabil," *Majalah Tempo*, 22 Januari 2012.

### Surat Kabar:

- Ahmad, Reza S, "Kemhan Geber Alutsista: Pemerintah diminta memetakan terlebih dahulu potensi ancaman keamanan bangsa," *Republika*, 16 Agustus 2012.
- "Amerika Bangun Biro Interogasi di LP," *Media Indonesia*, 15 Pebruari 2012.
- "Amerika Ingin Vietnam Buka Pelabuhannya," *Koran Tempo*, 4 Juni 2012.
- "Anggaran Militer US\$ 100 Miliar: Tiongkok Ingin Menangi 'Perang Lokal'," *Suara Pembaruan*, 5 Maret 2012.
- "AS Tarik 2 Brigade Pasukan dari Eropa," *Kompas*, 14 Januari 2012.
- Barnes, Julian E., "US Heralds Navy's Shift toward Asia," *The Wall Street Journal*, June 4, 2012.
- "China Protes Keras AS," *Kompas*, 6 Agustus 2012.
- "China Tingkatkan Anggaran Militer," *Media Indonesia*, 5 Maret 2012.
- "Didik: Ancaman Ego sektoral di Laut...," *Kompas*, 11 Pebruari 2012.
- "Dua Korea Kembali 'Panas'," *Kompas*, 21 Pebruari 2012.
- Floyd, Whaley, "Bases are gone, but US presence is felt in Philippines," *International Herald Tribune*, 30 April 2012.
- Gopalakrishnan, Raju, "Fighters, radar, marine patrols top Asia's militray wish-list," *The Jakarta Post*, 17 February, 2012.
- Hakim, Chappy, "Marinir Amerika di Australia," *Seputar Indonesia*, 22 November 2011.

- "Hillary Clinton Puji Indonesia: China Kecam AS Jangan Ikut Campur dalam Sengketa," *Kompas*, 5 September 2012.
- "Hindari Konflik Wilayah," *Republika*, 3 September 2012.
- Hulwan, Arif, "China Tudung AS Cari Masalah," *Media Indonesia*, 6 Juni 2012.
- \_\_\_\_\_. "AS Berupaya Bendung Pengaruh China di Pasifik," *Media Indonesia*, 2 September 2012.
- "Kapal Siluman Lengkapi TNI AL," *Kompas*, 1 September 2012.
- Kardi, Dika Dania "Kapal Perang AS Merapat ke Asia Pasifik," *Media Indonesia*, 4 Juni 2012.
- "Kapal Siluman Lengkapi TNI AL," *Kompas*, 1 September 2012.
- "Kebijakan Luar Negeri Indonesia," *Kompas*, 29 Pebruari 2012: 12.
- Kevin Ruud, "Tomorrow's Pax pacifica," *The Jakarta Post*, 13 February 2012.
- "Komitmen AS Masih Dipertanyakan," *Kompas*, 6 Maret 2012.
- "Kunjungan Hillary Clinton: AS-Indonesia Bahas Laut China Selatan dan Kerja Sama Militer," *Suara Pembaruan*, 3 September 2012.
- "Kunjungan Marinir AS," *Suara Pembaruan*, 11 Pebruari 2012.
- "Latma Carat 2102," *Media Indonesia*, 6 Juni 2012.
- Leksono, Ninok, "Dinamika Asia Pasifik dan Jet Tempur Mutakhir," *Kompas*, 16 Pebruari 2012.
- Leksono, Ninok, "Tank dan Senjata Penangkalnya," *Kompas*, 5 September 2012.
- "Marinir Beli Senjata Pertahanan Udara dan BMF-3," *Koran Tempo*, 16 Mei 2011.
- "Pangkalan AS di Darwin Menjaga Keseimbangan," *Kompas*, 13 Pebruari 2012.
- "Peran Indonesia Penting di Asia Tenggara," *Kompas*, 11 Pebruari 2012.
- "Pertahanan China Diperkuat: Anggaran Berganda, Pakai Kas Tambahan untuk Modernisasi Senjata," *Kompas*, 15 Pebruari 2012.
- Ramelan, Prayitno "Perseteruan AS dan China di Laut China Selatan," *Seputar Indonesia*, 22 Nopember 2011.
- Rusli, Mohd Hazmi bin Mohd, "Maritime highways of Southeast Asia: Alternative straits?" *The Jakarta Post*, 17 February 2012.
- "RI Berkepentingan Jaga Keamanan Laut China Selatan," *Suara Pembaruan*, 4 Juni 2012.
- "Sejarah harus Diingat, RSUD Abepura Dibangun Pada Masa Perang Pasifik," *Papua Pos*, 31 Mei 2012.
- "Super Tucano Perkuat Pertahanan Indonesia," *Seputar Indonesia*, 2 September 2012.
- "TNI Bangun Pangkalan Kapal Selam," *Suara Pembaruan*, 13 Agsutus 2012.
- "TNI expects stronger navy fleet by 2024," *The Jakarta Post*, 30 August 2012.
- "TNI AL Mendapatkan 14 Kapal Baru," *Kompas*, 17 Pebruari 2012.
- "TNI AL Tangkap Dua Kapal di Arafura," *Suara Pembaruan*, 5 Maret 2012.
- "William S. Cohen: Ingin Memastikan AS Stabil," *Majalah Tempo*, 22 Januari 2012.
- Wirawan, Jerome E. "Militer AS Perkuat Eksistensi," *Media Indonesia*, 13 Agustus 2013.
- "95% Cadangan Emas Freeport Ada di Papua," *Suara Pembaruan*, 7 Maret 2012.

#### Internet:

- "AS di Australia Bukan Ancaman bagi ASEAN," 16 November 2012, <http://us.vivanews.com/news/read/264838-as-di-australia-buka> ... diakses 11 Januari 2012.
- "AS Gelar Pasukan Marinir Permanen di Darwin," *Kompas.com*, 11 Nopember 2011, diakses 11 Januari 2012.
- "AS Fokus pada Kekuatan Militer Asia," *Kompas.com*, 18 Nopember 2011, diakses 11 Januari 2012.

- "China: Itu Bukti Mentalitas Perang Dingin," *Kompas.com*, 30 Nopember 2011, diakses 11 Januari 2012.
- Fadillah, Ramadhian, "Boediono: Tambahan Marinir AS di Darwin Bukan Ancaman," *DetikNews*, 7 Desember 2012, diakses 11 Januari 2011.
- "Geostrategi Indonesia," <http://www.blogspot.com/2010/02/geostrategi-indonesia.html>, 25 Pebruari 2010, diakses pada 30 Januari 2012.
- "Geopolitik," <http://www.scribd.com/doc/38166184/Pengertian-Geopolitik>, diakses pada 30 Januari 2012, diakses 30 Januari 2012.
- Hutapea, Rita Uli, "Wow! 2.500 Marinir AS Akan Ditempatkan di Australia," *detikNews*, 16 November 2011, diakses 11 Januari 2012.
- "Indonesia sebagai Negara Kepulauan," <http://www.scribd.com/doc/38166184/Pengertian>, 30 Januari 2012, diakses 30 Januari 2012.
- Marciel, Scot A., "New Thinking for a New Partnership." [USINDO@USINDO.org](mailto:USINDO@USINDO.org), diakses 23 Mei 2012.
- Marpaung, David Raja, "Ancaman Pangkalan AS di USA di Darwin, Australia," <http://www.Indonesiadefense-analysis.blogspot.com/2011/11/ancaman-pangk...>, diakses 11 Januari 2011.
- Maszudi, Eddy, "Segitiga RI, Timtim, dan Australia," <http://www.eastasiastudy.blogspot.com/2005/09/diplomasi-indonesia-australia...>, diakses 30 Januari 2012.
- "Melintas Wilayah Tanpa Izin, Pilot AS Ditahan di Balikpapan." *Suara Pembaruan.com*, 2 Oktober 2012, diakses 2 Oktober 2012.
- "Obama ke Australia Bahas Isu Keamanan," *Vivanews*, 16 Nopember 2011, diakses 11 Januari. 2011.
- Ramelan, Prayitno, "Marinir AS di Australia dan 70 Pasukan AS di Papua, Sebuah Ulasan," <http://www.hankam.kompasiana.com/2011/11/30/marinir-as-di-australia-da>, diakses 11 Januari 2011.
- Rumengan, Teddy, "TNI AU Tahan Pilot Ambon." *Jurnas.com*, 2 Oktober 2012, diakses 2 Oktober 2012.

